

Judul Buku : NU vis-a-vis NEGARA  
Pengarang : Andree FEILLARD  
Pengantar : Robert W. Hefner  
Penerbit : LKiS  
Tahun : 1999  
Tebal : 506 hal + xxvii (termasuk index)

Buku NU vis-a-vis NEGARA, menarik untuk dikaji. Terma vis-a-vis tidak berkonotasi NU "melawan" NEGARA. Lebih tepatnya NU di hadapan NEGARA atau 'dialog' interaktif antara NU dengan NEGARA. Klarifikasi ini pernah dikatakan Andree Feillard saat diskusi buku ini, 27 Pebruari 1999, di Yogyakarta.

Buku karya staf pengajar Sejarah Islam di INALCO Paris ini bisa memberikan informasi lengkap dan komprehensif mengenai NU. Sedikit melihat titik tekan karya-karya tentang NU sebelumnya, buku NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, Martin van Bruinessen (LKiS, 1994) mencoba mengelaborasi NU dengan penekanan pada konflik-konflik kepentingan agama-politik-ekonomi. Buku Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia, A. Gaffar Karim (LKiS, 1995) lebih mengkaji NU dari sisi politik, dengan pemilahan pra khittah dan pasca Khittah yang kemudian diarahkan pada analisis proses metamorfosis NU jangka panjang dan NU dalam politisasi Islam Indonesia. Sedangkan buku NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya, M. Masyhur Amin (1996) lebih menekankan deskripsi-historis mengenai perkembangan NU dari sisi kelembagaan, pemikiran dan Ijtihad politiknya, namun sayangnya disajikan tanpa analisis kritis yang berarti.

Banyak buku yang membahas tentang NU terjebak dalam deskripsi historis, terutama saat membahas panjang lebar peran politik NU pra khittah dan pasca khittah. Seringkali mereka tidak mampu menganalisis substansi atau maksud terdalam peran politik NU di dua era yang sangat berbeda tersebut. Sehingga mereka terkejut ketika melihat NU, pada era reformasi seperti sekarang ini, membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kelebihan buku NU vis-a-vis NEGARA antara lain adalah kejelian Andree Feillard untuk tidak terjebak ketika menganalisa setiap peran politik NU.

Feillard juga mampu mengemukakan thesis baru bahwa lahirnya NU tidak semata-mata reaksi langsung kaum tradisionalis Muslim terhadap kemajuan Islam modernis di Indonesia an sich. Menurutnya, maksud didirikannya NU adalah untuk menyediakan sebuah organisasi yang representatif untuk berangkat ke Arab Saudi guna menarik penguasa barunya yang menganut madzhab wahabi, yang akhirnya memunculkan Kemalisme di Turki. Pengiriman delegasi dari organisasi ini dirasa penting karena umat Islam Indonesia

berkepentingan agar mereka diperbolehkan mempertahankan tata cara ibadahnya yang sempat 'dipertanyakan' kaum wahabi puritan, yaitu membangun kuburan, berziarah ke makam para wali, membaca do'a-do'a tahlil, dan beribadah sesuai madzhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

Cornelis Lay berpendapat bahwa kejelian Feillard memasukkan elemen internasional ini dalam melihat perkembangan awal NU merupakan salah satu keunggulan buku ini. Pergulatan politik serius yang terjadi di Timur Tengah, ternyata telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam memaksa para elit tradisional Islam untuk mengadopsi bentuk-bentuk pengorganisasian modern guna memperjuangkan kepentingan mereka. Temuan ini menjadi menarik karena menemukan sisi lain dari alasan di balik kehadiran NU yang tidak semata-mata merupakan respons terhadap kebangkitan dan ancaman kaum modernis, tapi sekaligus merupakan respons organisasional atas perkembangan global dalam politik Islam.

Feillard sama sekali tidak bermaksud menyebut NU sebagai "organisasi tradisional" dalam pengertian penuh pemikiran kolot, konserfatif dan tidak dinamis, sebagaimana banyak dipersepsi banyak orang, tetapi tradisional dalam pengertian organisasi yang lebih menekankan pendekatan kultural, bukan revolusioner-radikal. Hal ini dibuktikan Feillard bahwa perkembangan NU akhir-akhir ini malah mampu memberi tanggapan terhadap realitas sosial dengan ide-ide yang terkadang mengejutkan atau bahkan melampaui pemikiran para Muslim modernis. Dalam bab XVI (Perkembangan Pemikiran Kaum Tradisionalis), dia menjelaskan dengan perubahan sosiologis masyarakat NU telah melahirkan aliran pemikiran pembaharuan. Pemikiran pembaharuan di lingkungan NU pertama kali diprakarsai oleh putra-putra kiai pada tahun 1950-an ketika mau tidak mau mereka harus menerima bagian dari modernitas, semisal pemakaian dasi dan celana panjang yang semula dianggap 'tabu' digunakan oleh tokoh agama.

Disamping itu masuknya secara bertahap para anak santri ke dalam sistem sekolah umum pada tahun 1970-an telah berperan membuka dunia NU yang semula relatif tertutup. Upaya kelompok pembaharuan dari kalangan tradisionalis ini sangat memerlukan kegigihan mengingat landasan dasar ulama konservatif, saat itu, masih sangat kuat. Ulama sepuh konservatif, yang berdiri menentang kaum muda, masih sangat mempertahankan tradisi-tradisi seperti menggunakan kati Bagdad untuk mengukur air atau minyak, melarang penggunaan jam konvensional atau mengharuskan melihat tinggi matahari untuk melakukan sholat, dll. Akhirnya secara lambat laun pemikiran di NU mulai agak cair. NU menerima program Keluarga Berencana diluar sterilisasi, vasektomi atau tubektomi (1969). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) muda pada Munas Cilacap (1987) melontarkan gagasan yang cukup mengejutkan para

kiai sepuh. Dia menggagas perlunya pribumisasi Islam. Menentang Arabisasi kebudayaan Indonesia yang tercermin dalam nama-nama keluarga baru, arsitektur-arsitektur masjid yang lebih bercorak Arab, ungkapan sopan santun dalam bahasa Arab, kebiasaan berpakaian atau memelihara jenggot dan menggunakan jilbab.

Gus Dur mensinyalir bila NU tidak melakukan pembaharuan, perannya akan diambil alih oleh cendekiawan LSM dan aktivis masjid kampus. Ternyata gagasan ini disambut positif oleh kalangan muda. Sejak saat itu mulailah berdiri LSM-LSM yang berafiliasi ke NU dan kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga baik dalam maupun luar negeri. Perkembangan gagasan NU lebih lanjut bisa dilihat dalam bab XVII (NU dalam politik Islamisasi) yang membahas peran NU dalam pembuatan kompilasi hukum Islam, UU Peradilan Agama, UU pendidikan, menentang larangan perkawinan antar agama, dan bersikap oposan terhadap ICMI.

Dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Feillard berhasil mengumpulkan data interview bahwa beberapa ulama NU membanggakan diri dengan mengatakan "99 %" KHI adalah pekerjaan mereka. Namun memang banyak diakui, materi KHI 90 % diambil dari ajaran madzhab Syafi'i yang hampir mutlak dianut ulama-ulama NU. (Hal 389-390) Jika memang data ini benar, menarik untuk diamati perkembangan transformasi pemikiran keagamaan di NU, terutama dalam hukum Islam. Karena KHI, terlepas dari beberapa kekurangannya, merupakan kumpulan produk-produk hukum Islam ala Indonesia, khususnya dalam bidang perdata keluarga. Kiranya ternyata NU, dalam wacana keagamaan, untuk sementara ini, berjalan dalam progresifitas tinggi bahkan jika dibandingkan kalangan Islam modernis.

\* \* \* \* \*

NU telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia dengan lebih mengintegrasikan Islam ke dalam negara-bangsa dan mengakui keabsahan negara "monoteis" yang bukan negara Islam maupun negara sekuler. Pernyataan ini sangat kentara disajikan Feillard dalam membahas Pencarian Dasar-Dasar Islam (Bab V) yang menghasilkan penghapusan kalimat "kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam sila pertama Pancasila. Legitimasi NU terhadap bentuk negara non-Islam juga sangat tampak ketika NU merespons Rencana Penyeragaman Idiologi (Bab IX) dengan hasil penerimaan NU terhadap program penyeragaman idiologi Pancasila oleh rezim Orde Baru. Sebenarnya di tubuh NU sendiri terjadi perpecahan ketika merespons penyeragaman asas tunggal. Kesepakatan penerimaan asas tunggal akhirnya tercapai setelah Kiai Achmad berusaha meyakinkan para kiai yang semula ragu-ragu. Argumen Kiai Achmad cukup rasional, ia mengatakan:

"Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak dapat bertentangan dan tidak

boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain. memang asas Islam (dalam partai NU) tidak dimaksudkan untuk membuat Islam menjadi idiologi politik, sebab Islam tidak boleh disamakan dengan idiologi politik. Islam adalah agama yang diwahyukan, sedangkan idiologi adalah hasil pikiran manusia". (Hal 243).

Sepertinya pendapat Kiai Achmad ini masih dianut dalam politik NU hingga sekarang, terbukti dengan idiologi PKB (yang disinyalir partai NU) bukanlah Islam, tapi semua sila Pancasila. Satu hal yang terkadang sering dilupakan oleh para pengamat, sebenarnya untuk lebih memahami sikap politik NU, sebelumnya perlu memahami tradisi politik Sunni yang mengakui keabsahan seorang raja (penguasa) bila pemerintahannya membawa ketertiban dan menjauhkan kekacauan (fitnah). Selama kondisi ini bisa tercipta NU berusaha menempuh jalur transformasi nilai-nilai Islam lewat "atas", lewat negara (politik praktis) dan sekaligus lewat "bawah".

Kalaupun tidak tercipta, NU masih mempunyai satu jalan, yakni melakukan transformasi lewat "bawah" secara kultural. Pemahaman semacam ini penting agar tidak bingung ketika memahami sikap politik NU sepanjang sejarahnya. Termasuk di dalamnya analisa mengenai kerenggangan NU dan ABRI (1968-1971), NU menjadi partai, NU mendominasi PPP, keluar dari PPP, kembali ke khittah 1926 atau bahkan di era reformasi NU membidani berdirinya PKB. Sebagai seorang ilmuwan Barat penghujung abad XX, sepertinya Feillard secara umum ingin menyepakati tesis pendahulunya, Martin van Bruinnesen, yang percaya bahwa kaum tradisional di banyak negara berkembang bukanlah arus konservatif yang selalu mengancam "keniscayaan" modernisasi. Kaum tradisional tampak sebagai semacam sine-ma yang merekam dan sekaligus mewartakan segala denyut emosional-intelektual-institusional penduduk pribumi untuk tetap menjadi "diri sendiri" dalam pergulatan yang tak terelakkan dengan "wacana zaman": modernitas. Sehingga ia dipandang memiliki irama dan tempo perubahan sendiri yang tidak pernah dapat terduga. Dan karena watak otentiknya yang cenderung menolak pemusatan, maka ia sesungguhnya memainkan "peran pembaharuan" yang unik.

Meskipun diakui buku ini sangat komprehensif, Feillard menurut kritik Cornelis Lay, belum menjelaskan suatu yang sebenarnya sangat penting yakni motif-motif kepentingan para kiai (dibalik NU) sebagai sebuah kolektifitas oligarkhis yang selalu merasa terancam status monopolinya baik dalam bidang agama, sosial dan politik. Penempatan tingkah laku politik kiai NU sebagai fungsi dari kepentingan begitu menonjol dalam pergulatan NU, terutama sejak ORBA. Sedang menurut Rizal Panggabean ada satu 'kece-robohan' dalam buku ini, yakni uraian Feillard mengenai penuhnya kontradiksi di dalam tubuh NU yang mampu menghilangkan anggapan mengenai NU yang

selalu kompak dan satu, semacam "organic whole" yang dipimpin oleh kiai-kiai kharismatik.

Betapun masih ada beberapa kekurangan, buku ini telah mampu menyediakan informasi lengkap tentang NU serta memuat beberapa tesis baru yang terkadang berbeda dengan tesis yang sudah ada sebelumnya. Dalam pengantarnya Robert W. Hefner menulis bahwa Andree Feillard telah menulis sebuah buku penting yang bisa dan harus berfungsi sebagai dasar penelaahan ulang kolektif terhadap gagasan kita mengenai Islam, Jawa dan politik kebudayaan Indonesia.

(Suhadi)